

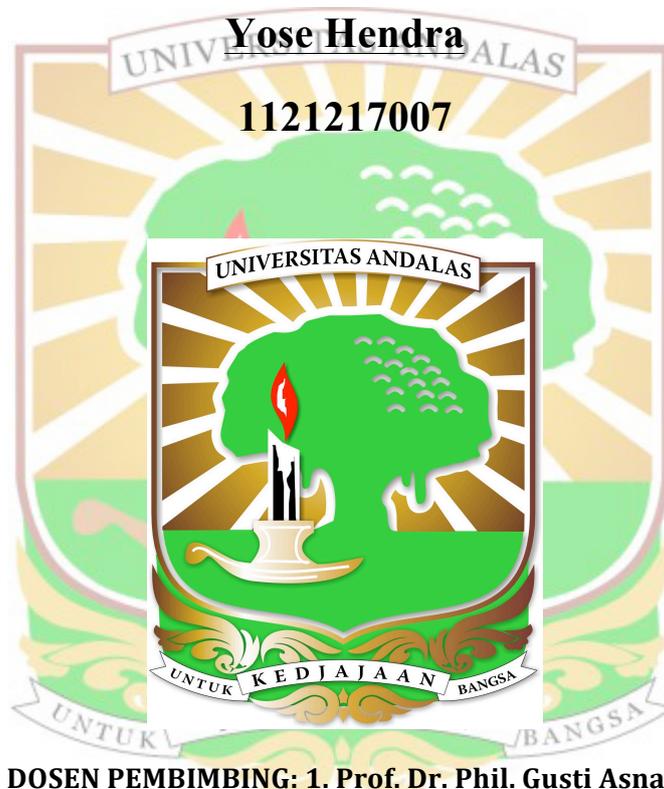
**SEJARAH PENANGANAN GEMPA BUMI  
SUMATERA BARAT 1926 DAN 2009**

**TESIS**

**Oleh:**

**Yose Hendra**

**1121217007**



**DOSEN PEMBIMBING: 1. Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan**

**2. Dr. Lindayanti, M.Hum.**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS ILMU BUDAYA**

**JURUSAN ILMU SEJARAH**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2017**

## ABSTRAK

Pada dasarnya, gempa di Sumatera Barat adalah peristiwa temporal yang terjadi berulang-ulang. Dari sekian kali didera gempa, kejadian di tahun 1926 dan 2009, merupakan yang terbesar dari sisi dampak yang ditimbulkan, dan di dua zaman berbeda pula. Secara geologi, defenisi gempa sebetulnya tetaplah guncangan dari perut bumi yang datang tiba-tiba. Tidak bisa diketahui kapan persisnya, dimana posisinya, dan seberapa besarnya. Maka, melihat kembali sejarah penanganan gempa tahun 1926 dan 2009 tentu penting dalam konteks memperkuat mitigasi bencana sekaligus pembelajaran untuk menangani dampak ancaman gempa berikutnya.

Penelitian bertemakan Sejarah Penanganan Gempa Bumi Sumatera Barat 1926 dan 2009, dengan tujuan untuk mengetahui tindakan dan pendekatan apa yang dilakukan saat dan setelah gempa terjadi. Penelitian ini berangkat dari konsep manajemen (penanganan) bencana melalui metode penelitian deskriptif analitis dikaji secara aspek sejarah struktural melalui pendekatan ilmu sosial dan kearifan yang ada di tengah masyarakat Sumatera Barat. Penelitian ini juga mengacu pada metode sejarah.

Hasil penelitian menemukan pola dan nilai-nilai penanganan antara dua kejadian gempa di dua era dan zaman berbeda, bisa dikomparasikan untuk diambil saripati sebagai asupan mitigasi gempa lebih baik kedepannya. Gempa 1926, dengan paparan gempa yang luas, korban relatif sedikit karena populasi yang sedikit masa itu. Lalu, kondisi terjajah saat itu, menjadikan pemerintah punya kewenangan penuh untuk mengatur arah penanganan. Jenjang penanganan lebih pendek dan tidak rumit. Militer sebagai garda terdepan dalam masa tanggap darurat, dan departemen (kementerian) di masa rehabilitasi dan rekonstruksi, cukup menipiskan adanya penyimpangan dan ketidakadilan. Dalam penelitian ini misalnya, tidak ditemukan ada kasus korupsi dana gempa.

Sementara gempa 2009, di mana terjadi pada era kemerdekaan, bahkan disebut zaman kemajuan, bukan berarti pola penanganan lebih baik dibanding gempa era kolonial tahun 1926. Pada gempa 2009, panglima penanganan adalah pengaturan (regulasi) seperti Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, mestinya membuat arah penanganan jelas secara alur dan struktur. Namun, faktanya regulasi pun tidak menjamin kelancaran penerapan penanganan, termasuk menyangkut keadilan, keterbukaan, dan kepuasan. Sebaliknya, temuan soal korupsi dana gempa, protes dari korban gempa, dan kepentingan aktor-aktor penanganan, menunjukkan struktur penanganan gempa 2009 banyak celah untuk melakukan hal demikian, baik dengan niat memanfaatkan, atau pun karena kesempatan. Penelitian ini juga mendapati, struktur dan pola penanganan gempa 2009 mengabaikan pengalaman penanganan gempa masa lalu di Sumatera Barat, khususnya saat gempa 1926.

Di luar struktur yang di desain otoritas, kearifan dari masyarakat sendiri seperti petuah Minangkabau *kaba baiak bahimbauan, kaba buruak bahambauan*, atau lebih dalam lagi, *yang berat sama dipikul dan yang ringan sama dijinjing*, masih berjalan dengan baik pada dua respons kejadian gempa tersebut. Artinya ini modal sosial yang sangat bagus dalam menghadapi gempa atau bencana lainnya. Terlebih, Sumatera Barat khususnya, dan Indonesia secara umum berdiri di tanah yang sewaktu-waktu kadang bergerak dan menghentak atau lazim dikatakan bagian integral *ring of fire*.

**Kata Kunci: Gempa 1926, Gempa 2009, Manajemen Bencana, Tanggap Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kearifan Lokal Minangkabau**